Kabupaten
Nunukan

2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH





DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2026 ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) ini memuat informasi perencanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 tentang Pembangunan Kabupaten Nunukan khususnya PD Kabupaten Nunukan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun merupakan bahan masukan yang diperlukan guna penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini tidak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2026.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan PD Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

Nunukan, Februari 2025
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga, serta Pariwisata

ABDUL HALID, ST, M. AP
NIP: 19660421 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... *i*
DAFTAR ISI ..... *ii*
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU **10**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **30**
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 30
3.3 Program dan Kegiatan 35

BAB IV RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **39**
BAB V PENUTUP **43**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun kedepan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD. Rencana Kerja (Renja) merupakan turunan dari Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. RENJA PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

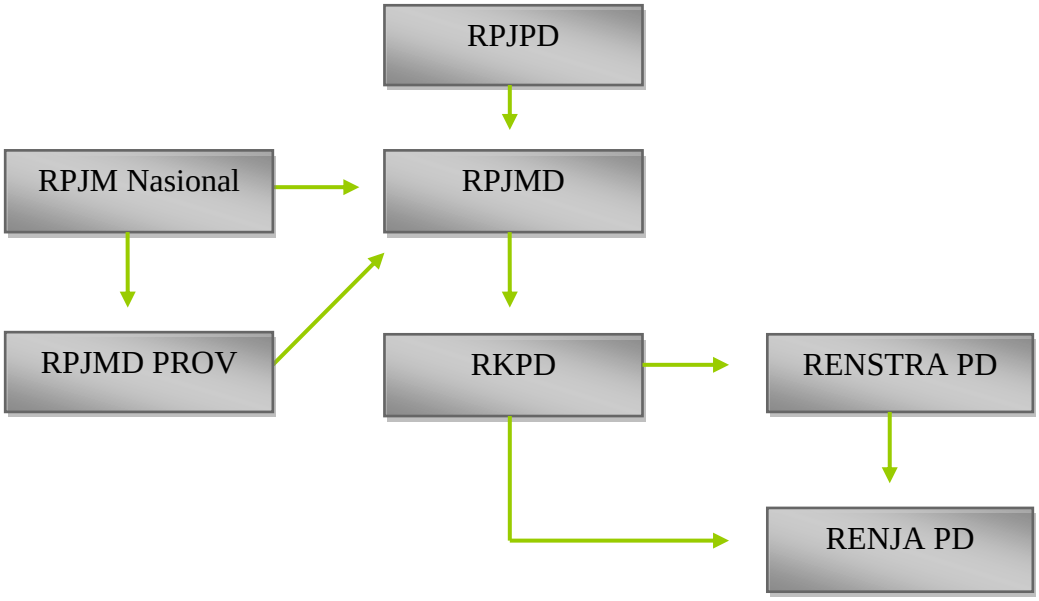
Dengan demikian RENJA PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RENJA Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan, dan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Renja dilaksanakan melalui serangkaian pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Pariwisata, Bidang Pemuda dan Olahraga.

Secara skematis hubungan antara rencana strategis (Renstra) Dinas sampai Rencana Kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dilihat pada skema berikut :



Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Kepariwisataan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan 2021-2026.

Tahun Anggaran 2026 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta PariwisataKabupaten Nunukan 2021-2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 yang memuat rencana program dan kegiatan , serta Sub Kegiatan yang tertuang dalam Kepatusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepetusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan kebutuhan dana/pagu indikatif yang untuk dianggarkan dalam APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini PD Kabupaten Nunukan berpedoman kepada peraturan yang berlaku antara lain:

1) Undang-Undang Nomor.47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan.
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahaan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11) Peraturan Menteri dalam Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Koderifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14) Kepatusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepetusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033;

16) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;
18) Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi danTata Kerja Perangkat Daerah
19) Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 452 Tahun 2021 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja PD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang berisi: Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD Kabupaten Nunukan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan:

1. Menjabarkan visi, misi dan program kegiatan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi PD Kabupaten Nunukan.
2. Menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan PD untuk tahun 2026.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja PD bertujuan untuk menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan

sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan maupun evaluasi pada setiap tahun anggaran;
d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja PD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 mengacu pada *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017* sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan untuk membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil análisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD Kabupaten Nunukan, asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi yang ditujukan kepada PD Kabupaten Nunukan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Kabupaten Nunukan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan Penjelasan Mengenai

a. faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- Total Kebutuhan dana/ Pagu indikatif dan kegiatan tidak sesuai dengan rancanagan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

c. Penjelasan jika rumusan dan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian ketentuan penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dapat dilihat dalam kajian atau review yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun – tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan mengacu pada pelaksanaan Renstra PD dan perkiraan pelaksanaan DPA PD tahun berjalan yang sudah disahkan. Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD belum disusun maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra PD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra PD.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realiasasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah atau Realisasi APBD uantuk perangkat Daerah yang bersangkutan. Evaluasi pelaksana Renja terhadap pencapaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan

NO	KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2024	
												Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)							(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
A	2	22	05	0	0	0	URUSAN KEBUDAYAAN										
1.	2	22	05	0	00	00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	76% Persen	95.000.000	20 Persen	56 Persen	36 Persen	64%	76 Persen	0% Persen	0%
	2	22	05	2	01	00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkaji	17 objek	65.000.000	3 objek	5 objek	6 objek	120%	5 objek	0 objek	0%
	2	22	05	2	01	01	Pendaftaran objek di duga cagar Budaya	jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	19 objek	30.000.000	3 objek	6 objek	6 objek	100%	6 objek	0 objek	0%
	2	22	05	2	01	02	Penetapan cagar budaya	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	17 objek	35.000.000	3 objek	5 objek	6 objek	120%	5 objek	0 objek	0%
	2	22	05	2	02	00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelolah	17 objek	30.000.000	0 objek	4 objek	4 objek	100%	5 objek	0 objek	0%
	2	22	05	2	02	02	Pengembagan cagar budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	17 objek	30.000.000	0 objek	4 objek	4 objek	100%	5 objek	0 objek	0%
2.	2	22	02	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase 10 Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	100 Persen	25.000.000	1 Persen	30 Persen	20 Persen	67%	40 Persen	- Persen	0%
	2	22	02	2	01	00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	4 objek	25.000.000	1 objek	1 objek	1 objek	100%	1 objek	0 objek	0%
	2	22	02	2	01	01	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan pemanfaatan	4 Objek	15.000.000	1 Objek	1 Objek	1 Objek	100%	1 Objek	0 Objek	0%
	2	22	02	2	01	02	Pembinaan sumber daya manusia,lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah Peserta pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan	150 orang	10.000.000	0 orang	2 orang	25 orang	1250%	50 orang	0 orang	0%
3.	2	22	03	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	80% Persen	50.000.000	- Persen	60 Persen	20 Persen	33%	80 Persen	- Persen	-
	2	22	03	2	01	00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembinaan kesenian yang dilakukan	4 pembinaan	50.000.000	0 pembinaan	1 pembinaan	1 pembinaan	100%	1 pembinaan	0 pembinaan	0%
	2	22	03	2	01	01	Peningkatan pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisonal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	120 orang	15.000.000	- orang	15 orang	30 orang	200%	5 orang	0 orang	0%
	2	22	03	2	01	02	Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenia tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	90 sertifikat	15.000.000	- sertifikat	25 sertifikat	25 sertifikat	100%	25 sertifikat	0 sertifikat	0%
	2	22	03	2	01	03	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	120 lembaga	20.000.000	1 lembaga	30 lembaga	33 lembaga	110%	5 lembaga	0 lembaga	0%
4.	2	2	22	04	0	00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah lokal	80 %	40.000.000	0 %	60 %	40 %	67%	100% %	- %	0%
	2	2	22	04	2	01	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penggalian dan pembinaan sejarah lokal	5 sejarah	40.000.000	0 sejarah	1 sejarah	1 sejarah	100%	1 sejarah	- sejarah	0%
	2	2	22	04	2	02	Pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah lokal kab/kota	Jumlah SDM dan lembaga sejarah lokal kab/ kota yang diberdayakan	6 orang	15.000.000	- orang	0 orang	0 orang	0%	2 orang	0 orang	0%
	2	2	22	04	2	0'3	Penyediaan sarana dan prasana pembinaan sejarah		3 unit	10.000.000	0 unit	1 unit	2 unit	200%	1 unit	0 unit	0%
	2	2	22	04	2	04	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat di akses masyarakat	4 dokumen	15.000.000	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%

NO	KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2024	
												Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)							(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	2	19	00	0	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
5.	2	19	02	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	37%	% 559.100.000	0,11 %	9,39 %	9,16 %	98%	9,63 %	- %	-
	2	19	02	2	01	00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan pengembangan pemuda	13811 org	459.100.000	299 org	2823 org	14 2776	0,50%	2895 org	0 org	0%
	2	19	02	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	23 Org	10.000.000	0 Org	10 Org	5 Org	50%	25 Sertifikat	0 Org	0%
	2	19	02	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	12717 Org	10.000.000	0 Org	200 Org	50 Org	25%	50 Org	0 Org	0%
	2	19	02	2	01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pemuda kader kabupaten/kota yang diseleksi sebagi pasukan pengibar bendera dan diberikan	1094 Org	439.100.000	299 Org	0 Org	0 Org	-	0 Org	0 Org	0%
	2	19	02	2	02	00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	1 Organisasi	100.000.000	1 Organisasi	1 Organisasi	0 Organisasi	0%	1 Organisasi	1 Organisasi	100%
	2	19	02	2	02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	8 dokumen	100.000.000	1 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%	2 dokumen	1 dokumen	13%
6.	2	19	03	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	persentase peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	72%	% 3.052.460.000	77,14 %	71,00 %	50 %	70%	9 Cabor	- Cabor	-
	2	19	03	2	02	00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	10 event	532.336.000	1 event	3 event	3 event	100%	3 event	0 event	0%
	2	19	03	2	02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	8 dokumen	532.336.000	1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	150%	2 kegiatan	0 dokumen	0%
	2	19	03	2	04	00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	2 Organisasi	2.500.000.000	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	100%	2 Organisasi	0 Organisasi	0%
	2	19	03	2	04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	16 dokumen	2.500.000.000	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	0 dokumen	0%
	2	19	03	2	05	00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	1 Kegiatan	20.124.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300%	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
	2	19	03	2	05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan	16 dokumen	20.124.000	4 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	75%	1 Lembaga	0 Lembaga	0%
7.	2	19	04	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan organisasi pramuka	28,47%	% 200.000.000	26 %	27,74 %	25 %	91%	100,00 %	- %	-
	2	19	04	2	01	00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1 Organisasi	200.000.000	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100%	1 Organisasi	- Organisasi	0%
	2	19	04	2	01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	15917 org	200.000.000	2434 org	3.517 org	6388 org	182%	4.275 org	- org	0%
	3	26	00	0	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							0%			
8.	3	26	02	0	00	00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	50 %	850.000.000	1,25 %	42,50 %	44,38 %	104%	48,13 %	%	0%

NO	KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2024	
												Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)							(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	3	26	02	2	01	00	**Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota**	**Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah**	3 DTW	385.000.000	1 DTW	1 DTW	1 DTW	0%	1 DTW	- DTW	0%
	3	26	02	2	01	02	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Daya Tarik wisata kabupaten/kota	3 dokumen	200.000.000	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0%	1 dokumen	- dokumen	0%
	3	26	02	2	01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 lokasi	150.000.000	1 lokasi	- lokasi	0 lokasi	0%	0 lokasi	- lokasi	0%
	3	26	02	2	01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan daya Tarik wisata kabupaten/Kota	5 dokumen	35.000.000	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	- dokumen	0%
	3	**26**	**02**	**2**	**03**	**00**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelolah**	**1 Destinasi**	**445.000.000**	**1 Destinasi**	**1 Destinasi**	1 Destinasi	100%	**1 Destinasi**	- Destinasi	0%
	3	26	02	2	03	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwsata kabupaten/ Kota	0 dokumen	120.000.000	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0
	3	26	02	2	03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	3 unit	260.000.000	1 unit	5 unit	9 unit	180%	5 unit	0 unit	0%
	3	26	02	2	03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	4 Laporan	65.000.000	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	25%
	3	**26**	**02**	**2**	**04**	**00**	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota**	**Jumlah laporan pengawasan/ pembinaan TDUP**	**4 laporan**	**20.000.000**	**0 laporan**	**1 laporan**	1 laporan	**100%**	**1 laporan**	0 laporan	0%
	3	26	02	2	04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha pariwisata	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	4 Laporan	20.000.000	0 Laporan	- Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	- Laporan	0 Laporan	0%
	3	26	02	2	04	08	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menegah Rendah di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	84 usaha	0	0 usaha	84 usaha	84 usaha	0%	84 usaha	0 usaha	0%
9.	**3**	**26**	**03**	**0**	**00**	**00**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata**	**100 %**	**476.800.000**	**20 %**	**60 %**	60 %	**100%**	**80 %**	0 %	0%
	3	**26**	**03**	**2**	**01**	**00**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah promosi/pemasaran pariwisata**	**7 promosi**	**476.800.000**	**1 promosi**	**2 promosi**	2 promosi	**100%**	**2 promosi**	0 promosi	0%
	3	26	03	2	01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui Media Cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam luar negeri.	7 dokumen	176.800.000	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0%	2 promosi	0 dokumen	0%
	3	26	03	2	01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	6 laporan	300.000.000	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 Kegiatan	0 laporan	0%
10.	**3**	**26**	**05**	**0**	**00**	**00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbina**	**50,00% %**	**71.940.000**	**16,97 %**	**33,49 %**	**28,57 %**	**85,31%**	**15,72 %**	**0 %**	0%
	3	**26**	**05**	**2**	**01**	**00**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan**	**17 sektor**	**21.940.000**	**1 sektor**	**17 sektor**	**2 sektor**	**0%**	**17 sektor**	- sektor	0%
	3	26	05	2	01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	150 orng	21.940.000	0 orng	0 orng	0 orng	0%	0 orng	0 orng	0%

NO	KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2024	
												Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(1)						(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	3	26	05	2	01	01	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 orng	17.894.500	0 omg	50 omg	50 omg	0%	50 omg	50	100%
	3	**26**	**05**	**2**	**02**	**00**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi**	**1 pelatihan**	**50.000.000**	**1 pelatihan**	**1 pelatihan**	**1 pelatihan**	**100%**	**1 pelatihan**	0 pelatihan	**0%**
	3	26	05	2	02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	200 orng	50.000.000	49 omg	50 omg	50 omg	100%	50 omg	0 omg	**0%**
10.	**3**	**26**	**04**	**0**	**00**	**00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase pengembangan pemanfatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual**	**25 %**	**52.000.000**	**0 %**	**33,49 %**	33,49 %	100%	**41,74 %**	- unit	**0%**
	3	**26**	**04**	**2**	**01**	**00**	**Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah ruang bereksperesi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia**	**1 ruang ktratif**	**52.000.000**	**0 ruang ktratif**	**1 ruang kreatif**	1 ruang kreatif	**0%**	**1 ruang ktratif**	0 unit	**0%**
	3	26	04	2	01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	jumlah penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif	1. unit	52.000.000	0 unit	1 unit	1 unit	0%	1 unit	0 unit	**#VALUE!**
														0%			
11.	**X**	**XX**	**01**	**0**	**00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.847.140.000**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**20 %**	**100%**
	X	**XX**	**01**	**2**	**01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas**	**32 dokumen**	**22.000.000**	**8 dokumen**	**8 dokumen**	**8 dokumen**	**100%**	**8 dokumen**	3 dokumen	**9%**
	X	XX	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	11.000.000	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	**13%**
	X	XX	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24 dokumen	11.000.000	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	2 dokumen	**8%**
	X	**XX**	**01**	**2**	**02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi keuangan**	**1 unit**	**2.807.630.855**	**1 unit**	**1 unit**	**1 unit**	**100%**	**1 unit**	3 Unit	**300%**
	X	XX	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 orang	2.807.630.855	25 orang	26 orang/bulan	26 orang/bulan	100%	27 orang	26 orng/bulan	**90%**
	X	**XX**	**01**	**2**	**06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi umum**	**1 unit**	**236.817.200**	**1 unit**	**1 unit**	1 unit	**100%**	**1 unit**	0 Unit	**0%**
	X	XX	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	59.574.500	5 paket	4 paket	4 paket	100%	3 paket	1 paket	**8%**
	X	XX	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	56.928.700	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	0 paket	**0%**
	X	XX	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 paket	10.314.000	2 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	0 paket	**0%**
	X	XX	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi	83 laporan	110.000.000	10 laporan	22 laporan	22 laporan	100%	22 laporan	9 laporan	**11%**
	X	**XX**	**01**	**2**	**08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**40 laporan**	**693.691.945**	**8 laporan**	**8 laporan**	**8 laporan**	**100%**	**8 laporan**	24 Laporan	**60%**
	X	XX	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	20 Laporan	92.686.900	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	1 laporan	**5%**

NO	KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2024	
												Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)							(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	X	XX	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	20 Laporan	601.005.045	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	1 laporan	5%
	X	**XX**	**01**	**2**	**09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**11 unit**	**87.000.000**	**9 unit**	**12 unit**	**12 unit**	**100%**	**11 unit**	**- unit**	**0%**
	X	XX	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit	26.000.000	2 unit	4 unit	4 unit	100%	5 unit	- unit	0%
	X	XX	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	8.000.000	6 unit	6 unit	8 unit	133%	6 unit	- unit	0%
	X	XX	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	53.000.000	2 unit	3 unit	1 unit	33%	1 unit	- unit	0%
										9.319.440.000							

Tabel diatas merupakan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja PD pencapaian renstra sampai dengan tahun 2023. Evaluasi pelaksanaan renja dilakukan di tahun 2022(n-3), 2023(n-2) dan 2024 (n-1). Dari Tabel tersebut terlihat bahwa realisasi renja tahun 2022 -2023 dapat dianalisis kerena merupakan tahun pertama dan kedua pelaksanaan Renstra yang akan disusun dalam periode renstra 2021-2026.

Untuk tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program dan kegiatan pada periode renstra 2021-2026, sehingga realisasi kinerja hanya dapat dianalis sampai triwulan I. Dari Analisis capaian kinerja terlihat bahwa hanya beberapa sub kegiatan sudah memiliki realisasi sampai triwulan I, disebabkan karena pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan renja tahun 2024 masih sementara berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan PD berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK dengan berdasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja *outcome* dari sasaran strategis. Indikator *outcome* adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya suatu *output.* Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut berdasarkan RENSTRA PD Kab. Nunukan Tahun 2021-2026

Indikator kinerja *input* adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM dengan satuan orang.

Capaian pelayanan kinerja PD berdasarkan pelaksanaan renstra PD tahun 2021-2026 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel .T-C30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata
Kabupaten Nunukan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/Standar Nasional	IKK /(PP-6/08)	TARGET					REALISASI					Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)
1	Persentase pelestarian Nilai Budaya Lokal	-	-	-	44%	56%	69%	82%	-	25%	28%	52%	31,11%	Realisasi Kinerja 2025 triwulan I
2	Jumlah PAD sektor Pariwisata	-	-	-	21.993.000	22.212.930	Rp 22.435.059	Rp 22.435.059	Rp 22.689.410	Rp 32.674.000,00	Rp 40.334.000,00	Rp 45.139.000,00	Rp16.667.000,00	Realisasi Kinerja 2025 triwulan I
3	Rata-rata Lama tinggal	-	-	-	1 hari	3 hari	3 hari	3 hari	-	1 hari	3 hari	2 hari	2 hari	Realisasi Kinerja 2025 triwulan I
4	Presentase peningkatan prestasi pemuda	-	-	83,75%	14,20%	16,47%	18,12%	21,31	55,54%	6,89%	14,82%	2,34%	0%	Realisasi Kinerja 2025 triwulan I
5	Presentase peningkatan prestasi atlit	-	-	93,75%	47%	51,72%	56%	60%	62,87%	60,67%	82,11%	43,75%	0%	Realisasi Kinerja 2025 triwulan I

Berdasarkan tabel T.C30 menguraikan tentang capaian indikator kinerja perangkat daerah, yang tercantum dalam Renstra tahun 2021-2026. Indikator Kinerja yang termasuk dalam Renstra 2021-2026 antara lain:

a. Persentase Pelestarian Nilai Budaya local.
b. Jumlah PAD sector Pariwisata.
c. Rata-rata lama Tinggal.
d. Peningkatan Prestasi Pemuda.
e. Presentase Peningkatan prestasi atlit.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi indikator kinerja untuk tahun berjalan (2025) sehingga pencapaian kinerjanya belum dapat diukur. Untuk realisasi capaian kinerja tahun 2024, terlihat bahwa indikator presentase pelestarian nilai budaya lokal mengalami peningkatan sebesar 24% dari tahun 2023. Jumlah PAD sektor Pariwisata terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023, sedangkan Rata-rata lama tinggal tahun 2024 juga mengalami penurunan menjadi 2 hari dibandingkan tahun 2023. Presentase peningkatan atlit berprestasi mengalami penurunan menjadi 43,75% dan presentase pemuda berprestasi juga mengalami penurunan menjadi 2,34%. Sedangkan di tahun 2025 persentase kenaikan kunjungan wisata belum dapat di analisis karena program kegiatan/sub kegiatan sementara berjalan. Indikator sasaran ditahun berjalan (2025) sebagai tahun ketiga pelaksanaan Rentra 2021-2026.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan. Penyelenggaraan tugas dan fungsi PD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra.

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena pengaruhnya yang signifikan bagi daerah. Penentuan isu-isu strategis menggunakan metode skor berdasarkan urusan, seperti pada tabel di bawah ini :

1. Urusan Pariwisata

No	Kriteria	Bobot
1	Belum optimalnya pengelolaan objek wisata daerah	50
2	Belum optimalnya Pemasaran Pariwisata dan usaha ekonomi kreatif	50
Total		**100**

2. Urusan Kebudayaan

No	Kriteria	Bobot
1	Belum optimalnya Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah	100
Total		**100**

3. Urusan Pemuda Olahraga

No	Kriteria	Bobot
1	Masih Rendahnya Prestasi Kepemudaan	50
2	Masih Rendahnya Prestasi Olahragaan	50
Total		100

Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan PD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pelayanan satuan kerja perangkat daerah PD mengalami beberapa tantangan dan peluang di antaranya sebagai berikut:

Tantangan

1. Masih minimnya pembinaan SDM, Lembaga dan pranata seni dan budaya, sehingga pengembangan nilai-nilai seni dan budaya belum optimal.
2. Masih kurangnya event-event kesenian dan kebudayaan sebagai wujud dari pelestarian seni dan budaya baik tingkat Daerah maupun Nasional

3. Belum adanya TIM TACB Kabupaten Nunukan sehingga penggalian dan penetapan cagar budaya yang belum optimal.
4. Belum Optimalnya penggalian sejarah sehingga informasi dan pembinaan sejarah belum dapat di akses oleh masyarakat.
5. Masih rendahnya sumber daya pariwisata.
6. Letak geografi Kabupaten Nunukan yang sulit terjangkau dengan transportasi sehingga menjadi permasalah dalam pengembangan kepariwisataan.
7. Kurangnya pengelolaan obyek – obyek wisata yang ada, baik dari pihak pemerintah maupun swasta serta masyarakat.
8. Sarana dan prasarana obyek wisata yang masih terbatas sehingga pengembangan sektor kepariwisataan belum memadai.
9. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian pariwisata.
10. Masih kurangnya pembinaan olahraga tehadap cabang – cabang olahraga berprestasi.
11. Rendahnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
12. Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan.
13. Kurang optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan

Disamping hambatan – hambatan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa peluang-peluang yang diterapkan dapat meningkatkan kinerja PD yaitu:

Peluang

1. Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten perbatasan bumi paling utara borneo sebagai daerah yang memiliki ragam seni dan budaya serta kearifan local.
2. Tingginya minat masyarakat dalam hal seni dan budaya
3. Kabupaten Nunukan memiliki cagar budaya yang perlu diletapkan dan dilestarikan
4. Adanya potensi pengembangan kepariwisataan sebagai daerah perbatasan.
5. Tingginya minat masyarakat untuk berwisata
6. Tingkat persepsi dan espektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyaman di obyek wisata meningkat
7. Pemberian bonus terhadap atlet berprestasi
8. Tingginya minat masyarakat di bidang keolahragaan;

9. Tingginya Potensi pemuda dalam meningkatkan kepemimpinan, kepeloporan, kemandirian, kewirausahaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) yang memuat: rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta PariwisataKabupaten Nunukan, berdasarkan RKPD Kabupaten Nunukan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se- Kabupaten Nunukan yang melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2023 untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Ada beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BERUPA POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

NO	USULAN	MASALAH	VOLUME	LOKASI
1	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Semenisasi lapangan olahraga multifungsi desa lembada kecamatan krayan barat	1 paket	Desa lembada kecamatan krayan barat, Kab. Nunukan
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Perlu peningkatan perlengkapan	1 paket	Desa Tanjung Hilir Kecamatan Lumbis, Kab. Nunukan

DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
USULAN PRIORITAS MUSRENBANG KECAMATAN

USULAN PRIORITAS		LOKASI	KECAMATAN	VOLUME	OPD PELAKSANA
1		2	3	4	5
1	Pengembangan pariwisata pesisir	Padaidi	Sebatik		Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2	Pengadaan Sarana Prasarana Perlengkapan Alat Olahraga	Karang Taruna Desa Lapri	Sebatik Utara	1 Paket	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3	Pembangunan/Rehab Lapangan Olahraga	Desa Seberang RT. 05	Sebatik Utara	1 Kegiatan	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

4	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Desa Sungai Limau (Penyediaan Sapras Wisata dan Pengembangan Kapasitas POKDARWIS)	Sebatik Tengah		Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
5	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Desa Kalampising, Kab. Nunukan	Lumbis		Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
6	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Lumbis Hulu		Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
7	Penambahan Ornamen/Ukiran di Bandara Yuvai Semaring Long Bawan		Krayan		Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
8	Pengadaan Alat Musik Tradisonal Lokasi Long Layu	Long Layu	Krayan Selatan	1 Paket	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
9	Pengadaan Alat Musik Tradisonal Lokasi Tang Laaan	Tang Laan	Krayan Selatan	1 Paket	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
10	Membangun Sarana dan Prasarana Wisata Desa Daerah Kampung Lama	Pa' Sing	Krayan Selatan	1 Paket	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
11	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Lumbis Hulu		Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

12	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Lumbis Hulu		Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
13	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Lumbis Hulu		Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
14	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Lumbis Hulu		Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
15	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Lumbis Hulu		Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Nunukan.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. kebijakan merupakan suatu keputusan untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu, agar pencapaian sesuai dengan rencana, misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *Akuntabilitas Publik*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan, sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu ukuran yang akan memberikan informasi ***sejauh mana kita telah berhasil*** mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan

Mengaju pada pernyataan visi dan misi pembangunan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata di Kabupaten Nunukan, maka tujuan pembangunan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan yang hendak dicapai oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 sebagai berikut;

Tujuan I **Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah**	**Tujuan II** **Meningkatnya kinerja sektor pariwisata**
Sasaran I **Meningkatnya pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya lokal**	**Sasaran II** **Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah**
Tujuan III **Optimalisasi peran Pemuda**	**Tujuan IV** **Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga**
Sasaran III **Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Kepemudaan**	**Sasaran IV** **Meningkatnya Kompetensi Atlit Berprestasi**

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator jangka menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan 2021-2026 yang ingin dicapai dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel .3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Nunukan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
			2021	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah		**Persentase Pelestarian Keragaman Nilai seni budaya yang dikelola**	**31%**	**69%**	**69%**	**77%**	**85%**	**100%**
	Meningkatnya pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya lokal	Persentase pelestarian Nilai Budaya Lokal	33%	44%	56%	69%	82%	98%
Meningkatnya kinerja sektor pariwisata		**Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara)**	**12,988**	**14,641**	**15,436**	**16,277**	**17,167**	**18,110**
	Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah	Jumlah PAD sektor Pariwisata	0	21,993,000	22,212,930	22,435,059	22,659,410	22,886,004
		Rata-rata Lama Tinggal	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
Optimalisasi peran pemuda		**Persentase Organisasi pemuda yang aktif**	**29%**	**31%**	**34%**	**37%**	**40%**	**43%**
	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kepemudaan	Presentase peningkatan prestasi pemuda	12.65%	14.20	16.47	18.12	21.31	21.91
Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga		**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**51%**	**57%**	**63%**	**69%**	**71%**	**74%**
	Meningkatnya Kompetensi Atlit Berprestasi	Presentase peningkatan prestasi atlit	43%	47%	52%	56%	60%	65%

3.3. Program dan Kegiatan

a. Program

1. Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perencanaan pembangunan Kabupaten Nunukan;
2. Keberhasilan dan kualitas implementasi dari program dan kegiatan pada Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Program merupakan kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan. Adapun program Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan ada *10 program* untuk tahun 2026 sebagai berikut :

1. Program pengembangan Kebudayaan
2. Program pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pembinaan Sejarah
4. Program Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
8. Program Pengembangan ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Intelektual.
9. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

10. Program Pengembangan Kapasiitas Daya Saing Kepemudaan
11. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan/ Sub Kegiatan

Kegiatan adalah merupakan suatu penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Sedangkan *Sub Kegiatan* adalah bentuk aktivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klarifiikasi, kodefikasi dan nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. maka Kegitan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 antara lain:

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota

a. Perlindungan Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan.
b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan

2. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

3. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupeten/Kota

a. Peningkatan Kapasitas tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
b. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
c. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

4. Pembinaan sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah

c. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

5. Penetapan Cagar Budaya Perongkat Kabupaten/Kota

a. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya

b. Penetapan Cagar Budaya

6. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

a. Pengembangan Cagar Budaya

7. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. Penyediaan Bahan Logistik

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

11. Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

12. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

a. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan dan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat Kabupaten/Kota

b. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota

c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota

13. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi, sinkronasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota

14. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

15. Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga

a. Peningkatan kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait.

16. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

a. Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi

17. Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

a. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

18. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

a. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata kabupaten/Kota

b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

c. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

19. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

b. Pengadaaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota

c. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

20. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata daerah Kabupaten/Kota

a. Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota

21. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota

a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.

b. Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

22. Penyediaan Prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengembanagan dan Revitalisasi prasaran kota kreatif.

23. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

a. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

b. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

24. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

a. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

BAB IV
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEBUTUHAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAGA SERTA PARIWISATA

NO	KODE						KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/APBN-DAK)	CATATAN PENTING
								INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI		
(1)	(2)						(3)	(4)		(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(5)	(8)	(11)
A	2	22	05	0	0	0	URUSAN KEBUDAYAAN										
1.	2	22	05	0	00	00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	76%	135.000.000	Kab. Nunukan	76%	135.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	22	05	2	01	000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkaji	objek	5	85.000.000	Kab. Nunukan	5	85.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	22	05	2	01	0001	Pendaftaran objek di duga cagar Budaya	jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	objek	6	35.000.000	Nunukan, Lumbis Hulu, Tulin Onsoi	6	35.000.000	Nunukan, Lumbis Hulu, Tulin Onsoi	APBD	
	2	22	05	2	01	0002	Penetapan cagar budaya	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	objek	5	50.000.000	Nunukan, Lumbis Hulu, Tulin Onsoi	5	50.000.000	Nunukan, Lumbis Hulu, Tulin Onsoi	APBD	
	2	22	05	2	02	00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelolah	objek	5	50.000.000	Kab. Nunukan	5	50.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	22	05	2	02	0002	Pengembagan cagar budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	objek	5	50.000.000	Krayan, Nunukan, Lumbis, Sembakung	5	50.000.000	Krayan, Nunukan, Lumbis, Sembakung	APBD	
2.	2	22	02	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase 10 Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	Persen	40%	75.000.000	Kab. Nunukan	40%	75.000.000	Kab. Nunukan	*APBD*	
	2	22	02	2	01	00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	objek	1	25.000.000	Kab. Nunukan	1	25.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	22	02	2	01	0001	Pelindungan dan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan pemanfaatan	Objek	1	15.000.000	Kab. Nunukan	1	15.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	22	02	2	01	0002	Pembinaan sumber daya manusia, Lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah Peserta pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan	orang	50	10.000.000	Kab. Nunukan	50	10.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	22	02	2	03	00	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Adat yang terbina	lembaga	1	50.000.000	Kab. Nunukan	1	50.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	22	02	2	03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang disediakan/difasilitasi	unit	1	50.000.000	Desa Tanjung Hilir(Kec. Lumbis)	1	50.000.000	Desa Tanjung Hilir(Kec. Lumbis)	APBD	
3.	2	22	03	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	Persen	80%	50.000.000	Kab. Nunukan	80%	50.000.000	Kab. Nunukan	*APBD*	
	2	22	03	2	01	00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembinaan kesenian yang dilakukan	pembinaan	1	50.000.000	Kab. Nunukan	1	50.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	22	03	2	01	0001	Peningkatan pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisonal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	orang	30	15.000.000	Kab. Nunukan	30	15.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	22	03	2	01	0002	Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	sertifikat	25	15.000.000	Kab. Nunukan	25	15.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	22	03	2	01	0003	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	30	20.000.000	Kab. Nunukan	30	20.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
4.	2	2	22	04	0	00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah lokal	%	60%	40.000.000	Kab. Nunukan	60%	40.000.000	Kab. Nunukan	*APBD*	
	2	2	22	04	2	01	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penggalian dan pembinaan sejarah lokal	sejarah	1	40.000.000	Kab. Nunukan	1	40.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	2	22	04	2	0001	Pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah lokal kab/kota	Jumlah SDM dan lembaga sejarah lokal kab/ kota yang diberdayakan	orang	3	15.000.000	Kab. Nunukan	3	15.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	2	22	04	2	0002	Penyediaan sarana dan prasana pembinaan sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah	unit	1	10.000.000	Kab. Nunukan	1	10.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	2	22	04	2	0003	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat di akses masyarakat	dokumen	1	15.000.000	Kab. Nunukan	1	15.000.000	Kab. Nunukan	APBD	

NO	KODE						KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/APBN-DAK)	CATATAN PENTING
								INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI		
(1)	(2)						(3)	(4)		(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(5)	(8)	(11)
	2	19	00	0	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
5.	2	19	02	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	%	9,63%	300.000.000	Kab. Nunukan	9,63%	530.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	02	2	01	00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan pengembangan pemuda	org	115	200.000.000	Kab. Nunukan	115	430.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	02	2	01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen	1	200.000.000	Kab. Nunukan	1	200.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	02	2	01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Org	25	100.000.000	Kab. Nunukan	15	210.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	02	2	01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Org	5	100.000.000	Kab. Nunukan	50	220.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	02	2	02	00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	Organisasi	1	100.000.000	Kab. Nunukan	1	100.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	02	2	02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	100.000.000	Kab. Nunukan	2	100.000.000	Kab. Nunukan	APBD	

NO	KODE						KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/APBN-DAK)	CATATAN PENTING
								INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI		
(1)	(2)						(3)	(4)		(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(5)	(8)	(11)
6.	2	19	03	0	00	0000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	%	71%	3.152.460.000	Kab. Nunukan	71%	3.152.460.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	03	2	02	0000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	event	3	532.336.000	Kab. Nunukan	3	532.336.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	03	2	02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	3	532.336.000	Kab. Nunukan	3	532.336.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	03	2	04	0000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	Organisasi	2	2.600.000.000	Kab. Nunukan	2	2.600.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	03	2	04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	dokumen	4	2.600.000.000	Kab. Nunukan	6	2.600.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	03	2	05	0000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kegiatan	1	20.124.000	Kab. Nunukan	1	20.124.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	03	2	05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	1	20.124.000	Kab. Nunukan	4	20.124.000	Kab. Nunukan	APBD	
7.	2	19	04	0	00	0000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan organisasi pramuka	%	28,47%	300.000.000	Kab. Nunukan	28,47%	300.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	04	2	01	0000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Organisasi	1	300.000.000	Kab. Nunukan	1	300.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	04	2	01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	organisasi	1	300.000.000	Kab. Nunukan	4275	300.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	3	26	00	0	00	000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
8.	3	26	02	0	00	000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	%	48,13%	1.000.000.000	Kab. Nunukan	48,13%	1.000.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	3	26	02	2	01	000	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	DTW	2	505.000.000	Desa Sumantipal, Desa Lumbis	2	505.000.000	Desa Sumantipal, Desa Lumbis	APBD	
	3	26	02	2	01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota	Laporan	2	45.000.000	Desa Tau Lumbis,Sumantipal	2	45.000.000	Desa Tau Lumbis,Sumantipal	APBD	
	3	26	02	2	01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	orang	45	160.000.000	Kec. Lumbis Hulu	45	160.000.000	Kec. Lumbis Hulu		
	3	26	02	2	01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan Perancanagan pengembangan Daya Tarik wisata Unggulan kabupaten/kota	dokumen	2	300.000.000	Desa Sumantipal, Desa Lumbis	2	300.000.000	Desa Sumantipal, Desa Lumbis	APBD	
	3	26	02	2	03	000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelolah	Destinasi	1	473.000.000	Kab. Nunukan	1	473.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	3	26	02	2	03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	1	125.000.000	Kec.Nunukan Selatan	1	125.000.000	Kec.Nunukan Selatan		
	3	26	02	2	03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehablitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	unit	5	280.000.000	Kec. Nunukan	5	280.000.000	Kec. Nunukan	APBD	
	3	26	02	2	03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Laporan	2	68.000.000	Desa Naputi, Desa Srinanti	2	68.000.000	Desa Naputi, Desa Srinanti	APBD	
	3	26	02	2	4	000	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan/ pembinaan TDUP	laporan	1	22.000.000		1	22.000.000			
	3	26	02	2	4	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	usaha	84	22.000.000	Kec. Nunukan, Sebatik, Tulin Onsoi, Lumbis	84	22.000.000	Kec. Nunukan, Sebatik, Tulin Onsoi, Lumbis		
9.	3	26	03	0	00	00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	%	80%	185.870.000	Kab. Nunukan	80%	185.870.000	Kab. Nunukan	APBD	
	3	26	03	2	01	00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi/pemasaran pariwisata	promosi	2	185.870.000	Kab. Nunukan	2	185.870.000	Kab. Nunukan	APBD	
	3	26	03	2	01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Kegiatan	2	310.000.000	Kab. Nunukan	2	310.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	3	26	03	2	01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui Media Cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam luar negeri.	promosi	2	185.870.000	Kab. Nunukan	2	185.870.000	Kab. Nunukan	APBD	
10.	3	26	05	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbina	%	41,74%	323.950.000	Kab. Nunukan	41,74%	323.950.000	Kab. Nunukan	APBD	
	3	26	05	2	01	00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	sektor	1	271.950.000	Kab. Nunukan	1	271.950.000	Kab. Nunukan	APBD	
	3	26	05	2	01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	org	50	21.950.000	Kab. Nunukan	50	21.950.000	Kab. Nunukan		

NO	KODE						KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/APBN-DAK)	CATATAN PENTING
								INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI		
(1)	(2)						(3)	(4)		(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(5)	(8)	(11)
	3	26	05	2	01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	org	52	250.000.000	Kab. Nunukan	52	250.000.000	Kab. Nunukan	APBD	Pemutakhiran
	3	**26**	**05**	**2**	**02**	**00**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi**	pelatihan	1	52.000.000	Kab. Nunukan	1	52.000.000	Kab. Nunukan	**APBD**	
	3	26	05	2	02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	org	50	52.000.000	Kab. Nunukan	50	52.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
11.	**3**	**26**	**04**	**0**	**00**	**00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase pengembangan pemanfatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual**	%	75%	52.000.000	**Kab. Nunukan**	75%	52.000.000	**Kab. Nunukan**	**APBD**	
	3	**26**	**04**	**2**	**01**	**00**	**Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah ruang bereksperesi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia**	ruang kreatif	1	52.000.000	**Kab. Nunukan**	1	52.000.000	**Kab. Nunukan**	APBD	
	3	26	04	2	01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	jumlah penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif	unit	1.	52.000.000	Kab. Nunukan	1.	52.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
12.	**X**	**XX**	**01**	**0**	**00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	Nilai	BB	1.268.817.200	**Kab. Nunukan**	BB	1.268.817.200	**Kab. Nunukan**	**APBD**	

NO	KODE						KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/APBN-DAK)	CATATAN PENTING
								INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI		
(1)	(2)						(3)	(4)		(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(5)	(8)	(11)
	X	**XX**	**01**	**2**	**01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas**	dokumen	8	22.000.000	**Kab. Nunukan**	8	22.000.000	**Kab. Nunukan**	**APBD**	
	X	XX	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perencanaan perangkat daerah	dokumen	2	11.000.000	Kab. Nunukan	2	11.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	X	XX	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	6	11.000.000	Kab. Nunukan	6	11.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	X	**XX**	**01**	**2**	**02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi keuangan**		1	-	**Kab. Nunukan**	1	-	**Kab. Nunukan**	**APBD**	
	X	XX	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orangbulan	29	s	Kab. Nunukan	29	s	Kab. Nunukan	APBD	
	X	**XX**	**01**	**2**	**06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi umum**	unit	1	244.817.200	**Kab. Nunukan**	1	244.817.200	**Kab. Nunukan**	**APBD**	
	X	XX	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	3	60.574.500	Kab. Nunukan	3	60.574.500	Kab. Nunukan	APBD	
	X	XX	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	3	57.928.700	Kab. Nunukan	3	57.928.700	Kab. Nunukan	APBD	
	X	XX	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	11.314.000	Kab. Nunukan	4	11.314.000	Kab. Nunukan	APBD	
	X	XX	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi	laporan	22	115.000.000	Kab. Nunukan	22	115.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	X	**XX**	**01**	**2**	**08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	laporan	8	915.000.000	**Kab. Nunukan**	8	915.000.000	**Kab. Nunukan**	**APBD**	
	X	XX	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	260.000.000	Kab. Nunukan	4	260.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	X	XX	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	665.000.000	Kab. Nunukan	4	665.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	X	**XX**	**01**	**2**	**09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	unit	11	87.000.000	**Kab. Nunukan**	11	87.000.000	**Kab. Nunukan**	**APBD**	
	X	XX	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	4	26.000.000	Kab. Nunukan	4	26.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	X	XX	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	6	8.000.000	Kab. Nunukan	6	8.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
	X	XX	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	unit	1	53.000.000	Kab. Nunukan	1	53.000.000	Kab. Nunukan	APBD	
JUMLAH											**6.883.097.200**			**7.113.097.200**			

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) PD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk di implementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, PD Kabupaten Nunukan menetapkan visi dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Nunukan dilanjutkan dengan merumuskan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran, sehingga penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Pelaksanaan Renja dapat di ukur dalam capaian kinerja PD Kabupaten Nunukan dimana dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh *sumber daya yang ada, Adanya komitmen pihak terkait, serta pendanaan yang memadai* sehingga capaian kinerja tersebut akan memberi dampak dalam peningkatan Pembangunan Daerah.

Kami menyadari Rencana Kerja PD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami akan terus melakukan penyempurnaan dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil gunanya. Demikian Rencana Kerja PD Kabupaten Nunukan disusun dan diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik.

Nunukan, Februari 2025
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olah raga, serta Pariwisata

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

ABDUL HALID, ST, M. AP
NIP: 19660421 199803 1 006

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2026	

Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 18.736.000				Rp. 18.736.000	Rp. 220.000.000
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 16.580.000				Rp. 16.580.000	Rp. 150.000.000
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 14.021.000				Rp. 14.021.000	Rp. 150.000.000
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 250.000.000
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa		Rp. 160.428.770				Rp. 160.428.770	Rp. 1.000.000.000
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga									
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 1.500.000.000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi									
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 61.731.428				Rp. 61.731.428	Rp. 200.000.000
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan									
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 200.000.000
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 21.981.260				Rp. 21.981.260	Rp. 41.639.320
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 24.971.340				Rp. 24.971.340	Rp. 24.995.000
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 4.223.835.823				Rp. 4.223.835.823	Rp. 4.537.708.911
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun			Rp. 41.750.000			Rp. 41.750.000	Rp. 150.000.000
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 49.992.850				Rp. 49.992.850	Rp. 100.000.000
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 15.247.595				Rp. 15.247.595	Rp. 234.995.000
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 99.986.000				Rp. 99.986.000	Rp. 150.000.000
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 249.600.000				Rp. 249.600.000	Rp. 244.181.000
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 999.944.400				Rp. 999.944.400	Rp. 986.198.112
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 34.983.500				Rp. 34.983.500	Rp. 34.990.700
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 7.950.000				Rp. 7.950.000	Rp. 7.960.000
2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 35.000.000	Rp. 10.000.000			Rp. 45.000.000	Rp. 200.000.000
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 295.983.540	Rp. 4.003.780			Rp. 299.987.320	Rp. 400.000.000
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.991.000				Rp. 49.991.000	Rp. 50.000.000
2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa		Rp. 64.979.820				Rp. 64.979.820	Rp. 70.000.000
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 19.987.500				Rp. 19.987.500	Rp. 50.000.000
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH									
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 19.680.000				Rp. 19.680.000	Rp. 50.000.000
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 18.850.000				Rp. 18.850.000	Rp. 50.000.000
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.620.000				Rp. 24.620.000	Rp. 75.000.000
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 23.720.000				Rp. 23.720.000	Rp. 50.000.000
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.066.400				Rp. 14.066.400	Rp. 95.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									
3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 191.563.200				Rp. 191.563.200	Rp. 180.000.000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 115.000.000			Rp. 115.000.000	Rp. 250.000.000
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 144.257.590	Rp. 20.400.000			Rp. 164.657.590	Rp. 320.000.000
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 80.470.585				Rp. 80.470.585	Rp. 100.000.000
3	26	02	2.03	0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 214.100.000				Rp. 214.100.000	Rp. 220.000.000
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota									
3	26	02	2.04	0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 28.448.625				Rp. 28.448.625	Rp. 100.000.000
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.850.000				Rp. 11.850.000	Rp. 2.000.000.000
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa		Rp. 146.934.260				Rp. 146.934.260	Rp. 200.000.000
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif									
3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 26.890.080				Rp. 26.890.080	Rp. 75.000.000
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 17.541.250				Rp. 17.541.250	Rp. 50.000.000
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif									
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		Rp. 35.287.500				Rp. 35.287.500	Rp. 55.000.000
Jumlah									**Rp. 7.764.211.316**	**Rp. 191.153.780**			**Rp. 7.955.365.096**	**Rp. 14.822.668.043**

Kab. Nunukan,.....
Kepala DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Abdul Halid, S.T.,M.A.P
NIP. 196604211998031006